

BIAYA TRANSAKSI USAHA PENANGKAPAN IKAN DI KOTA PEKALONGAN

Eva Anggraini¹⁾

ABSTRACT

TRANSACTION COST ON FISHING IN PEKALONGAN

Economic efficiency is often measured from production aspect and lack of attention to non-production aspect, such as transaction cost. In fishing, much expenditure out of production cost was spent by ship owners and, thus, decreases the benefit of business. This research was conducted to identify and to measure the components of transaction cost on fishing, to measure and to analyze the impact of transaction cost to economic efficiency. The largest component of the transaction cost was catch retribution with the range of 30 to 51 percent of the total transaction cost. The ratio of transaction cost and revenue in Pekalongan ranged from 0.06 to 0.10 and the largest part went to other parties that did not contribute to the production activities.

Key words: transaction cost, ratio of transaction cost and revenue

ABSTRAK

Efisiensi ekonomi sering kali hanya diukur dari segi produksi, dan kurang memperhatikan segi non-produksi seperti biaya transaksi. Dalam usaha penangkapan ikan, banyak sekali pengeluaran di luar biaya produksi yang ditanggung oleh pemilik kapal. Pengeluaran ini disadari atau tidak mengurangi tingkat penerimaan dari usaha penangkapan ikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya transaksi pada usaha penangkapan ikan, serta mengukur dan menganalisis pengaruh biaya transaksi terhadap efisiensi ekonomi usaha tersebut. Komponen biaya transaksi terbesar adalah retribusi hasil tangkapan yang berkisar antara 30 dan 51 % dari total biaya transaksi yang dikeluarkan. Nisbah biaya transaksi terhadap penerimaan yang dihadapi pemilik kapal di Pekalongan berkisar antara 0,06 dan 0,10, dan sebagian besar dari biaya transaksi tersebut diserap oleh pihak lain dan tidak mendukung kegiatan produksi.

Kata kunci : biaya transaksi, nisbah biaya transaksi terhadap penerimaan

PENDAHULUAN

Usaha penangkapan ikan merupakan salah satu jenis usaha yang dominan dalam sektor perikanan dan kelautan mulai dari usaha penangkapan yang bersifat subsisten, artisanal hingga komersial. Usaha ini juga penggerak usaha-usaha lain di sektor kelautan dan perikanan, seperti perdagangan ikan segar untuk konsumsi domestik maupun luar negeri, industri pengolahan seperti tepung ikan, serta industri manufaktur seperti industri pengalengan. Peran usaha penangkapan ikan sebagai pemasok bahan baku ikan sangat menentukan keberlanjutan industri-industri tersebut dan secara makro pun menentukan perekonomian wilayah pesisir.

Usaha penangkapan ikan perlu didukung dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif yang bisa memberikan insentif bagi nelayan pemilik modal untuk mengembangkan usahanya. Kenyataannya, selama ini pelaku usaha perikanan tangkap menghadapi berbagai macam biaya mulai dari izin investasi, izin melaut hingga retribusi hasil tangkapan serta pungutan tidak resmi lainnya. Secara agregat, biaya-biaya transaksi yang tidak terkendali akan menciptakan ekonomi biaya tinggi bagi dunia usaha dan mengurangi surplus pada produsen. Tidak dapat

1) Departemen Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Kampus IPB Darmaga. Bogor 16680. Telp. 0251-621834, Fax. 0251-621762. E-mai: esl@ipb.ac.id

dipungkiri bahwa biaya transaksi ada di mana-mana dan tidak dapat dihindari dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya.

Kota Pekalongan merupakan salah satu pusat perikanan di Indonesia yang telah berkembang pesat sejak lama. Usaha penangkapan ikan yang berkembang di daerah ini umumnya merupakan skala menengah dan besar, berbeda halnya dengan Pelabuhanratu yang lebih didominasi oleh perikanan artisanal dan skala menengah. Hasil penelitian Anggraini (2005) di Pelabuhanratu menunjukkan bahwa terdapat beberapa komponen biaya transaksi yang dihadapi oleh pelaku usaha perikanan artisanal dan menengah di kota itu, antara lain besarnya biaya perantara (*middleman cost*) dan retribusi hasil tangkapan.

Perkembangan dunia usaha saat ini menunjukkan bahwa biaya transaksi tidak hanya muncul untuk sekadar mempertahankan kontrak atau kepemilikan. Munculnya biaya transaksi juga dipengaruhi oleh kondisi di daerah tersebut, baik sosial, ekonomi, dan budaya maupun kebijakan pemerintah setempat. Perbedaan kondisi perikanan di Kota Pekalongan dan Pelabuhanratu memberikan dugaan bahwa biaya transaksi yang muncul pun relatif berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk (1) mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya transaksi yang dihadapi oleh pelaku usaha penangkapan di Kota Pekalongan dan (2) menganalisis pengaruh biaya transaksi tersebut terhadap efisiensi ekonomi usaha penangkapan ikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan mengambil lokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Kota Pekalongan. Responden penelitian ini adalah pemilik kapal dengan total jumlah responden yang diambil adalah 30 orang yang dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu pemilik kapal *purse seine* (kapasitas lebih dari 30 GT), pemilik kapal *mini-purse seine* (kapasitas antara 10–30 GT), dan pemilik kapal *gillnet* (kapasitas kurang dari 10 GT).

Komponen biaya transaksi yang diidentifikasi dalam penelitian ini diturunkan dari tipe-tipe biaya transaksi yang dikemukakan oleh North & Thomas

diacu dalam Wang (2003). Total biaya transaksi yang dihadapi oleh pelaku usaha penangkapan ikan dihitung dengan menggunakan persamaan

$$TrC_j = \sum Z_{ij}$$

dengan: TrC_j = biaya transaksi pada jenis kapal j
 Z_{ij} = rerata komponen biaya transaksi i pada jenis kapal j

Tingkat efisiensi ekonomi usaha penangkapan ikan diukur melalui nisbah biaya transaksi terhadap penerimaan yang menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$z_j = \frac{TrC_j}{TR_j}$$

dengan
 TrC_j = total biaya transaksi pada jenis kapal j (Rp/tahun)
 TR_j = penerimaan dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan kapal jenis j (Rp/tahun)
 z_j = nisbah biaya transaksi – penerimaan pada jenis kapal j

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Biaya Transaksi

Usaha penangkapan ikan secara garis besar dibagi atas dua fase utama, yaitu fase investasi dan fase operasional. Fase investasi merupakan fase saat pemilik modal memulai atau mengembangkan usaha dalam bidang penangkapan ikan. Biaya transaksi yang muncul pada fase ini berlaku selama masa investasi dan beberapa izin berlaku dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekurang-kurangnya 5 tahun.

Fase kedua ialah fase operasional, yaitu fase ketika kegiatan penangkapan ikan berlangsung mulai dari persiapan melaut hingga hasil tangkapan ikan didaratkan dan dijual. Biaya transaksi yang muncul pada fase ini bersifat temporal. Beberapa komponen biaya transaksi ditanggung pada setiap trip penangkapan ikan dan beberapa komponen lainnya ditanggung per periode tertentu.

Secara konseptual, biaya transaksi diperkenalkan oleh Ronald Coase pada tahun 1937 melalui papernya yang berjudul "*The nature of firm*". Di dalam papernya tersebut, Coase menyebut biaya transaksi sebagai biaya yang timbul karena pelaksanaan mekanisme harga (*the cost of using the price mechanism*). Coase lebih menegaskan konsepnya

tentang biaya transaksi dalam papernya yang ditulis pada tahun 1961 yaitu biaya dari pelaksanaan transaksi atau pertukaran dalam pasar terbuka (*the cost of carrying out a transaction by means of an exchange on the open market*). Keputusan untuk melangsungkan transaksi dalam sebuah perusahaan atau pasar ditentukan oleh biaya transaksi, dan biaya transaksi itu sangat beragam dan ada terdapat dimana-mana (*ubiquitous*). Seperti dijelaskan oleh Coase *diacu dalam* Wang (2003):

Definisi tentang biaya transaksi semakin berkembang seiring dilakukannya studi pada beberapa sektor antara lain sektor industri perbankan dan lingkungan. Pengukuran biaya transaksi di sektor industri perbankan telah dilakukan oleh Wallis and North. Menurut Wallis and North *diacu dalam* Wang (2003), seluruh ekonomi dibagi dalam dua bagian, yaitu transformasi atau produksi dan transaksi, dengan mengukur total nilai dari sumber daya yang digunakan dalam sektor transaksi/jasa, akan menjadi agregasi biaya transaksi dari ekonomi (Wallis and North, 1986 *diacu dalam* Wang, 2003). Berdasarkan kerangka di atas, biaya transaksi dalam level mikro dipahami sebagai sesuatu yang hilang dari ekonomi, dengan kata lain semua biaya yang dikeluarkan oleh konsumen yang tidak ditransfer pada penjual, atau selisih antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli dengan jumlah yang diterima oleh penjual (Wallis and North, 1986 *diacu dalam* Wang, 2003).

North & Thomas *diacu dalam* Wang (2003) membagi biaya transaksi menjadi tiga tipe yaitu : (1) Biaya pencarian (*search costs*) yaitu biaya untuk mendapatkan informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu transaksi/pertukaran (*cost of allocating information about opportunity of the exchange*), (2) Biaya negosiasi (*negotiation costs*) yaitu biaya merundingkan syarat-syarat suatu transaksi/pertukaran (*costs of negotiating the terms of the exchange*), dan (3) Biaya pelaksanaan (*enforcement costs*) yaitu biaya untuk melaksanakan suatu kontrak/transaksi (*costs of enforcing the contract*).

Selain diukur dari nilai pasar, biaya transaksi menurut Hernando de Soto (1989) juga harus diukur dari aspek yang bukan nilai pasar (*non-marketed transaction cost*). Studi yang dilakukan oleh de Soto ini melengkapi kekurangan yang terdapat dalam studi

Wallis and North (1986). Menurut de Soto (1989), biaya transaksi non pasar (*non-marketed transaction cost*) antara lain adalah sumber daya yang dikeluarkan/dihabiskan dalam kondisi menunggu (*resources spent in waiting*), mendapatkan izin usaha, peresmian (*cutting through red tapes*), menyuap pejabat (*bribing officials*), dan lain sebagainya. Biaya transaksi non pasar ini menurut de Soto merajalela (*rampant*) dalam pembangunan ekonomi.

Fase Investasi. Investasi usaha penangkapan ikan yang umumnya berkembang di Kota Pekalongan adalah pada skala usaha sedang hingga besar. Secara garis besar, armada penangkapan ikan yang terdapat di PPN Pekalongan terdiri atas 3 kelompok, yaitu kapal *purseseine*, *mini purseseine*, dan *gillnet*. Dilihat dari ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan, kemampuan modal pelaku usaha perikanan di Kota Pekalongan cukup besar. Nilai investasi sebuah kapal *purseseine* berkisar antara Rp600 juta dan Rp1,2 miliar. Sementara untuk seorang pemilik, rata-rata investasi kapal *purseseine* yang dimiliki bernilai sekitar Rp3,5 miliar dengan jumlah kapal yang dimiliki lebih dari satu. Nilai investasi sebuah kapal *mini-purseseine* berkisar antara Rp100 juta dan Rp400 juta, dan rata-rata investasi yang dimiliki setiap pemilik mencapai Rp875 juta. Di lain pihak, nilai investasi sebuah kapal *gillnet* berkisar antara Rp50 juta dan Rp300 juta, dan rata-rata investasi yang dimiliki setiap pemilik mencapai Rp735 juta (Tabel 1).

Tabel 1 Kisaran dan total nilai investasi menurut jenis kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Jenis Kapal	Nilai Investasi per unit Kapal (Rp)		Total Investasi per orang atau kelompok (Rp)
	Kisaran	Rerata	
<i>Purseseine</i>	600 juta-1,2 milyar	873.461.538,00	3.559.615.385,00
<i>Mini-Purseseine</i>	100 juta-400 juta	400.000.000,00	875.000.000,00
<i>Gillnet</i>	50 juta-300 juta	218.928.571,00	734.642.857,00

Charles (2001) mengemukakan bahwa ciri usaha perikanan skala besar yang paling menentukan adalah adanya keragaman pilihan investasi yang besar. Para pemilik kapal di Kota Pekalongan pun memiliki pilihan-pilihan investasi di luar sektor perikanan. Meskipun demikian, investasi usaha penangkapan ikan di kota

ini masih cukup berkembang, yang mengindikasikan bahwa perikanan tangkap masih dianggap menguntungkan. Kemunduran investasi yang sedikit terjadi beberapa tahun terakhir lebih disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu meningkatnya biaya operasional karena kenaikan harga BBM.

Wilayah penangkapan kapal *mini-purse seine* dan *gillnet* berada pada zona perairan di atas 4 hingga 12 mil, sedangkan kapal *purse seine* mencapai laut lepas. Ciri perikanan yang *quasi open access* tersebut membuka peluang bagi setiap orang untuk masuk di bidang perikanan tangkap. Ciri *quasi open access* terlihat dari aturan perizinan yang diberlakukan bagi setiap investor yang ingin bergerak di bidang penangkapan ikan. Perizinan merupakan tahap legalisasi usaha sehingga kapal tersebut dapat beroperasi di zona perairan yang diperbolehkan. Surat-surat izin tersebut tidak hanya merupakan legalisasi kepemilikan aset, namun juga merupakan bukti kontrak suatu pihak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan yang ditentukan.

Perizinan yang dikelompokkan ke dalam fase investasi ini adalah izin-izin yang berlaku dalam jangka waktu lama (sekurang-kurangnya lima tahun), yaitu Izin Usaha Perikanan yang berlaku selama lima tahun. Surat Ukur Kapal dan Dokumen Kepemilikan Kapal berlaku dalam jangka waktu yang panjang selama kapal tidak mengalami perubahan dalam ukuran dan kapasitas. Biaya-biaya yang dikeluarkan pemilik kapal untuk mengurus izin dan dokumen-dokumen tersebut digolongkan sebagai biaya transaksi pada fase investasi. Berdasarkan perhitungan ketiga izin di atas, biaya transaksi yang ditanggung oleh pemilik kapal *purse seine* pada fase awal investasi masing-masing adalah Rp4.757.143, kapal *mini-purse seine* adalah Rp250.000, dan kapal *gillnet* Rp437.500.

Nisbah biaya transaksi (Tabel 2) terhadap nilai investasi kapal itu sendiri sangat kecil, yaitu hanya berkisar antara 0,0006 dan 0,0054. Dari ketiga jenis kapal tersebut nisbah biaya transaksi terhadap nilai investasi tertinggi terjadi pada kapal *purse seine*, yaitu 0,0054 yang berarti setiap investasi Rp100, pemilik kapal menanggung biaya transaksi sebesar Rp0,50. Angka nisbah ini sangat kecil, yang menunjukkan bahwa biaya yang dibebankan kepada seorang

pemilik modal yang ingin memulai usaha di bidang perikanan tangkap tidak besar. Dapat dikatakan bahwa kondisi untuk memulai investasi di bidang perikanan tangkap cukup kondusif di Kota Pekalongan.

Tabel 2 Biaya transaksi yang dikeluarkan pada awal investasi

Jenis Kapal	Nilai (Rp)	Nisbah terhadap rata-rata Investasi
<i>Purse seine</i>	4.757.143	0.0054
<i>Mini-Purse seine</i>	250.000	0.0006
<i>Gillnet</i>	437.500	0.0020

Fase Operasional. Biaya transaksi yang termasuk dalam fase operasional (Tabel 3) dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu *pertama*, izin operasional, yakni izin-izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan operasional. Izin ini berlaku dalam jangka pendek (tidak lebih dari 1 tahun) dan harus diperbarui setiap jangka waktu tersebut. Antara lain yang termasuk izin operasional adalah Surat Penangkapan Ikan (SPI), SIKPI, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan (mencakup nautis, teknis, dan radio), Pas Kapal, dan Dokumen Kepelautan (terdiri atas Ijazah Nahkoda, Daftar Awak Kapal, Buku Kesehatan). Biaya transaksi untuk izin operasional yang paling besar ditanggung oleh pemilik kapal *purse seine* rata-rata Rp5.348.333 per tahun sedangkan untuk kapal *mini-purse seine* dan kapal *gillnet* biaya yang ditanggung lebih rendah, yaitu Rp 1.358.750 dan Rp359.167. Persentase biaya transaksi izin operasional terhadap total biaya transaksi relatif kecil, yaitu berkisar antara 2 dan 9 %.

Tabel 3 Biaya transaksi usaha penangkapan ikan dalam fase operasional di PPN Pekalongan

Komponen Biaya Transaksi	<i>Purse seine</i>		<i>Mini Purse seine</i>		<i>Gillnet</i>	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Izin Operasional	5.348.333	7,3	1.358.750	8,7	359.167	2,3
Pendukung Operasional	2.139.182	2,9	881.250	5,6	1.214.500	7,8
Retribusi hasil lelang	37.388.752	51,3	4.852.800	30,9	7.429.590	47,8
Manajemen Usaha	8.123.077	11,1	4.500.000	28,7	3.257.143	21,0
Penanganan TPI	19.903.227	27,3	4.087.500	26,1	3.270.000	21,1
Total	72.902.571	100,0	15.680.300	100,0	15.530.400	100,0

Kedua, biaya pendukung operasional yang mencakup biaya tambat kapal, biaya masuk pelabuhan, biaya keamanan, biaya kebersihan, uang rokok aparat, uang rokok preman, dan biaya tarik. Biaya-biaya ini ditanggung oleh pemilik kapal dan tidak terkait dengan kegiatan produksi maupun hasil produksi. Pemilik kapal mengeluarkan biaya untuk komponen tersebut untuk mempermudah dan memperlancar segala kegiatan selama kapal mendarat serta menjaga relasi antar*stakeholder* yang beraktivitas di pelabuhan tersebut. Besarnya biaya transaksi untuk pendukung operasional yang dikeluarkan oleh pemilik kapal *purseseine* adalah Rp2.139.182 per tahun atau 2,9 % dari total biaya transaksi yang dikeluarkan. Pemilik kapal *gillnet* dan *minipurseseine* menghadapi persentase yang lebih besar, yaitu 7,8 dengan nominal Rp1.214.500 per tahun dan 5,9 % dengan nominal Rp881.250 per tahun.

Ketiga, pungutan perikanan dan retribusi hasil lelang. Pungutan perikanan ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang pelaku usaha karena keberadaannya di bidang penangkapan. Pungutan perikanan itu sendiri tidak mempengaruhi produktivitas atau pengembangan usaha yang bersangkutan sehingga digolongkan sebagai biaya transaksi. Sementara itu, retribusi hasil lelang merupakan salah satu pemasukan bagi kas daerah (PAD) yang sebagiannya digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut. Retribusi hasil lelang ini harus dibayarkan oleh setiap pengusaha yang menggunakan tempat pelelangan ikan (TPI) sebagai sarana untuk menjual hasil tangkapannya. Retribusi hasil lelang merupakan komponen biaya transaksi yang memiliki persentase terbesar bagi pemilik kapal, yaitu 51,3 % pada kapal *purseseine*, 30,9 % pada kapal *minipurseseine* dan 47,8 % bagi kapal *gillnet*.

Keempat, biaya manajemen usaha. Pemilik kapal biasanya mendelegasikan urusan-urusan yang terkait dengan pengaturan pengeluaran dan penerimaan serta pengurusan administrasi kapal kepada orang lain yang dipercaya. Pendelegasian tugas-tugas manajemen ini menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya manajemen berupa komisi/honor bagi pengelola tersebut. Kegiatan manajemen itu sendiri tidak termasuk dalam proses produksi dan tidak

menentukan hasil produksi. Persentase biaya manajemen usaha yang ditanggung oleh pemilik kapal cukup beragam, yaitu 11,1 % pada kapal *purseseine*, 28,7 % pada kapal *minipurseseine* dan 21,0 % pada kapal *gillnet*.

Kelima, biaya penanganan TPI. Seperti halnya retribusi hasil lelang, besar kecilnya biaya pengawasan dan penanganan TPI yang dibebankan pada pemilik kapal bergantung pada jumlah hasil tangkapan per unit armada tangkap. Komponen biaya pengawasan dan penanganan TPI mulai dari menjaga kebersihan, menjaga sarana TPI, keamanan, dan lain-lain. Persentase biaya pengawasan dan penanganan TPI terhadap total biaya transaksi yang ditanggung pemilik kapal cukup besar, yaitu 27,3 % bagi kapal *purseseine*, 26,1 % bagi kapal *minipurseseine*, dan 21,1 % bagi kapal *gillnet*.

Penelitian yang sejenis pernah dilakukan Anggraini (2005) di PPN Pelabuhanratu untuk armada penangkapan dengan alat tangkap *gillnet* dengan kapasitas kapal kurang dari 10 Grosston dan perahu motor tempel. Berdasarkan hasil identifikasi, komponen biaya transaksi tertinggi yang ditanggung oleh pemilik kapal motor *gillnet* adalah retribusi hasil tangkapan, yaitu 90,1 % dari total biaya transaksi, sementara pemilik perahu motor tempel lebih menghadapi biaya transaksi dari segi biaya perantara pemasaran, yaitu mencapai 93 %. Sementara pemilik kapal motor *gillnet* di Pelabuhanratu tidak menanggung biaya perantara pemasaran ini karena pada umumnya pemilik kapal juga berperan sebagai bakul (pengumpul ikan) yang selanjutnya menjual ikan ke wilayah-wilayah di luar daerah. Hasil penelitian Anggraini (2005) ini menunjukkan bahwa penguasaan informasi pasar sangat menentukan besar kecilnya biaya transaksi yang dikeluarkan sehingga secara langsung menentukan tingkat efisiensi usaha.

Informasi pasar di Pelabuhanratu sangat dikuasai oleh para bakul yang dalam hal ini juga merupakan pemilik kapal. Kondisi ini juga diperkuat oleh kondisi mekanisme lelang yang tidak berjalan di Pelabuhanratu. Dua kondisi ini memberikan keuntungan sekaligus merugikan bagi pemilik kapal. Di satu sisi pemilik kapal diuntungkan karena penguasaan informasi pasar yang baik, mereka tidak menanggung biaya perantara pemasaran. Di sisi lain, tidak ber-

jalannya mekanisme pasar (pelelangan ikan) menimbulkan biaya retribusi yang harus ditanggung oleh pemilik kapal menjadi lebih besar. Anggraini (2005) menghitung persentase biaya retribusi karena tidak berjalannya mekanisme lelang tersebut mencapai Rp 6.576.363,64 per tahun atau 90,1 % dari total biaya transaksi, sementara peneliti mencoba memprediksi bila mekanisme lelang terlaksana dengan baik, maka biaya retribusi yang seyogianya ditanggung akan lebih kecil, yaitu Rp 2.837.818,18 atau 79,1% dari total biaya transaksi (Tabel 4).

Tabel 4 Biaya transaksi usaha penangkapan ikan nelayan *gillnet* dengan kapasitas kurang dari 10 GT di PPN Pelabuhanratu

Komponen Biaya Transaksi	Lelang tidak Terselenggara*		Bila Lelang Terselenggara	
	Nilai (Rp)	(%)	Nilai (Rp)	(%)
Retribusi Hasil Tangkapan	6,576,363.64	90.11	2,837,818.18	79.71
Biaya Perantara Bakul/Non-Bakul	-	-	-	-
Biaya Tambat & Keamanan Kapal	128,000.00	1.75	128,000.00	3.6
Pelaksanaan Tradisi Laut	594,545.45	8.15	594,545.45	16.7
Total Biaya Transaksi	7,298,909.09	100	3,560,363.64	100

Sumber: Anggraini (2005)

Keterangan: * kondisi pada saat penelitian

Berbeda dengan Kota Pekalongan, penguasaan informasi pasar relatif merata karena berjalannya mekanisme lelang untuk hasil tangkapan. Setiap pengumpul atau pedagang yang ingin mendapatkan ikan harus mengikuti proses pelelangan. Adanya proses pelelangan menghilangkan biaya perantara pemasaran bagi pemilik kapal, dan biaya yang harus ditanggung adalah biaya retribusi hasil tangkapan yang di dalamnya juga termasuk biaya penyelenggaraan pelelangan. Meskipun biaya retribusi merupakan komponen terbesar yang dihadapi oleh pemilik kapal di Pekalongan, persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Pelabuhanratu.

Pengaruh Biaya Transaksi pada Efisiensi Ekonomi Usaha Penangkapan Ikan dan Perekonomian Lokal

Penerimaan yang dilihat dari hasil tangkapan ikan setiap nelayan sangat berfluktuasi. Dua faktor penting menyebabkan fluktuasi tingkat penerimaan usaha penangkapan ikan ini adalah (1) sumberdaya laut

yang bersifat *open access* mempengaruhi pola pemanfaatan sumber daya, dan (2) faktor ketidakpastian (Anggraini 2005). Sifat *open access* membuka kesempatan bagi semua pihak untuk masuk ke bidang perikanan tangkap sehingga tingkat penangkapan ikan menjadi tinggi. Kondisi ini menciptakan rasionalitas pada nelayan karena setiap nelayan berupaya untuk menangkap ikan sebesar-besarnya dan cenderung mengerahkan seluruh upaya yang dimiliki sehingga tekanan terhadap sumber daya menjadi tinggi.

Fluktuasi hasil tangkapan nelayan sering kali tidak diikuti oleh perubahan harga. Ciri perikanan adalah stok ikan yang terbatas. Pada perikanan *open access*, kenaikan harga ikan awalnya akan mendorong peningkatan hasil tangkapan, namun harga ikan yang terus naik pada titik tertentu tidak dapat mendorong peningkatan hasil tangkapan karena stok yang mulai menurun. Kurva penawaran seperti ini merupakan ciri perikanan *open access* atau disebut juga *backward bending supply*.

Wilayah perairan Kota Pekalongan yang termasuk wilayah Pantai Utara Jawa sangat padat akan kegiatan penangkapan ikan sehingga hampir mencapai kondisi kelebihan tangkap (*over fishing*). Namun dengan armada penangkapan yang besar, nelayan-nelayan di Kota Pekalongan mampu menangkap ikan hingga ke laut lepas dan perairan di wilayah lain sehingga hasil tangkapan masih besar. Kisaran harga ikan yang berlaku pada saat penelitian sangat beragam antara Rp 2.000 dan Rp 10.000 per kilogram, bergantung pada jenis ikan, ukuran ikan, serta mutu hasil tangkapan. Hasil tangkapan ikan dengan menggunakan kapal *purseseine* adalah yang terbesar, sedangkan kapal *mini-purseseine* dan *gillnet* tidak terpaut jauh. Rata-rata nilai penerimaan dari usaha penangkapan ikan setiap jenis kapal dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Nilai penerimaan usaha penangkapan ikan per tahun menurut jenis kapal

Jenis Kapal	Nilai Penerimaan (Rp/thn)
<i>Purseseine</i>	1.152.250.827
<i>Mini Purseseine</i>	161.760.000
<i>Gillnet</i>	181.110.000

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa total biaya transaksi yang ditanggung oleh pemilik kapal di Kota Pekalongan secara nominal sangat besar, yaitu Rp72.902.571 pada kapal *pursesaine*, Rp15.680.300 pada kapal *mini-pursesaine* dan Rp15.530.400 pada kapal *gillnet*. Untuk menilai tingkat pengaruh biaya transaksi terhadap efisiensi ekonomi usaha penangkapan ikan, dapat dihitung nisbah biaya transaksi terhadap penerimaannya. Hasil perhitungan menunjukkan nisbah tertinggi terjadi pada kapal *mini-pursesaine* sebesar 0,10 yang bermakna dalam setiap penerimaan Rp100 dari usaha penangkapan ikan, terjadi aliran uang keluar yang tidak dinikmati oleh pemilik kapal sebesar Rp 10. Kondisi ini jelas mengurangi keuntungan yang dinikmati oleh produsen. Sementara nisbah yang terjadi pada kapal *gillnet* sedikit lebih rendah dibandingkan kapal *mini-pursesaine*, yaitu 0,9, dan nisbah terendah terjadi pada kapal *pursesaine*, yaitu 0,06.

Angka nisbah biaya transaksi dan penerimaan yang terjadi di Kota Pekalongan sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan nisbah yang terjadi pada kapal *gillnet* di Pelabuhanratu yang bernilai 0,05. Angka nisbah 0,05 diperoleh dari biaya transaksi yang dikeluarkan dalam kondisi mekanisme lelang tidak berjalan, dan angka nisbah ini diperkirakan akan lebih rendah bila mekanisme lelang berjalan dengan baik di Pelabuhanratu. Dengan demikian, dari sudut pandang nisbah biaya transaksi terhadap penerimaan, dapat dikatakan bahwa efisiensi ekonomi usaha penangkapan ikan di Pelabuhanratu sedikit lebih baik dibandingkan Kota Pekalongan.

Tabel 6 Nisbah biaya transaksi* – penerimaan

Jenis Kapal	Nisbah
PPN Pekalongan	
<i>Pursesaine</i>	0.06
<i>Mini-pursesaine</i>	0.10
<i>Gillnet</i>	0.09
PPN Pelabuhan Ratu	
<i>Gillnet</i> (< 10 GT)	0.05

Sumber: data primer (2006) dan Anggraini (2005)

Keterangan: * tidak termasuk biaya transaksi pada awal investasi

terlihat bahwa komponen terbesar dikeluarkan untuk retribusi hasil tangkapan, pengawasan dan penanganan TPI dan manajemen usaha, sedangkan komponen izin operasional dan pendukung operasional relatif kecil. Bila dikaji lebih lanjut, ketiga komponen terbesar dari biaya transaksi tersebut memberikan dampak yang beragam bagi pembangunan dan perekonomian daerah termasuk juga untuk usaha penangkapan ikan.

Pertama, retribusi hasil tangkapan secara langsung masuk ke dalam kas daerah karena termasuk kelompok Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan penggunaannya adalah untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut, seperti sarana kesehatan, sarana pendidikan maupun sarana-sarana publik lainnya. Komponen biaya transaksi dinikmati secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku usaha penangkapan ikan melalui sarana-sarana publik tersebut, namun tidak memberikan dampak positif dalam mendukung produktivitas usaha penangkapan ikan.

Kedua, biaya penanganan TPI masuk ke dalam kas pengelola TPI dan digunakan untuk menjaga, merawat, memperbaiki maupun membangun sarana di TPI. Penggunaannya biaya pengawasan dan penanganan TPI ini secara langsung memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan bongkar muat kapal ikan di pelabuhan. Komponen biaya transaksi ini secara langsung dinikmati oleh pelaku usaha penangkapan ikan dan secara tidak langsung mendukung kegiatan produksi di bidang perikanan tangkap.

Ketiga, biaya manajemen usaha merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik kapal untuk mendapatkan pengelolaan dan pengaturan yang baik dari pihak lain yang dipercayakan. Berbeda dengan komponen biaya transaksi lainnya, meskipun tidak termasuk dalam kegiatan produksi, kegiatan manajemen usaha yang dilakukan mempengaruhi kinerja usaha yang secara langsung mempengaruhi produktivitas usaha. Hal ini menunjukkan bahwa biaya manajemen usaha adalah komponen biaya transaksi yang memiliki pengaruh positif untuk mendorong produktivitas. Biaya manajemen usaha merupakan *opportunity cost* bagi pemilik kapal untuk meningkatkan kinerja usaha. Bila pemilik kapal tidak menggunakan bantuan pihak lain untuk mengelola usaha, maka ia perlu men-

Bila dilihat dari komponen biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha penangkapan ikan

curahkan waktu lebih banyak untuk mengurus usaha tersebut dan akan kehilangan sejumlah waktu untuk mengurus pekerjaannya yang lain. Di sisi lain, bila pemilik kapal tidak mencurahkan waktu yang cukup untuk usaha tersebut maka ia akan menerima konsekuensi rendahnya kinerja usaha.

Dilihat dari uraian di atas serta presentase dari setiap komponen biaya transaksi (Tabel 7), sebagian besar biaya transaksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha penangkapan ikan diserap oleh pihak lain dan tidak berpengaruh pada kegiatan produksi usaha penangkapan ikan, yaitu berkisar antara 36,5 dan 58,6 %. Biaya transaksi yang secara tidak langsung mendukung kegiatan produksi usaha penangkapan ikan berkisar antara 28,9 dan 31,7 %. Sementara biaya transaksi yang memberikan pengaruh langsung terhadap kegiatan produksi namun tidak mempengaruhi jumlah produksi berkisar antara 11,1 dan 28,7 %.

Tabel 7 Tingkat pengaruh biaya transaksi terhadap kegiatan produksi usaha penangkapan ikan

Jenis Kapal	Tingkat Pengaruh		
	Langsung	Tidak Langsung	Tidak Sama Sekali
<i>Purseseine</i>	11,1	30,2	58,6
<i>Mini-purseseine</i>	21,0	31,7	36,5
<i>Gillnet</i>	28,7	28,9	55,6
Rerata	20	30	50

KESIMPULAN DAN SARAN

Biaya transaksi tidak dapat dihindari, namun dalam konteks ekonomi biaya transaksi harus diminimumkan agar efisiensi usaha dapat meningkat. Biaya transaksi yang terbesar dikeluarkan oleh pemilik kapal *purseseine*, yaitu Rp 72.902.571 per tahun. Dilihat dari beberapa komponen biaya transaksi yang dikaji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi hasil lelang memiliki persentase terbesar, yaitu berkisar 30-52%. Nisbah biaya transaksi terhadap penerimaan berkisar antara 0,06

dan 0,10 sedikit lebih tinggi dibandingkan nisbah yang terjadi di Pelabuhanratu. Biaya transaksi menyebabkan berkurangnya penerimaan bersih yang diterima oleh pemilik kapal. Sebagian besar biaya transaksi tersebut diserap pihak lain

Penelitian mengenai biaya transaksi ini masih perlu dikembangkan untuk menemukan komponen-komponen biaya transaksi yang lainnya. Selanjutnya penelitian juga perlu dikembangkan untuk sektor perikanan secara makro, agar dapat memberikan masukan untuk penurunan ekonomi biaya tinggi di sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen DW. 1991. *What Are Transaction Costs?* London: JAI Pr.
- Allen DW. 1999. *Transaction Cost*. 893 : 926 Department of Economics, Simon Fraser University.
- Anggraini. 2005. *Analisis Biaya Transaksi dan Penerimaan Nelayan dan Petani di Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor
- Benham A, Benham L. 2001. *The Cost of Exchange*. Ronald Coase Institute Working Paper.
- Charles A. 2001. *Sustainable Fishery Systems*. London: Blackwell Science
- Kuperan K *et al.* 1999. Measuring Transaction Cost of Fisheries Co-management in San Salvador Island, Philippines. *Naga, The ICLARM Quarterly* (Vol. 22: no. 4)
- Langlois RN. 1995. *Transaction Costs, Production Costs, and the Passage Time*. Department of Economics University of Connecticut Working Paper Series.
- North DC. 1990. *Institution, Transaction Costs and Productivity in the Long Run (paper)*.
- Wang N. 2003. *Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey*. Ronald Coase Institute Working Paper.
- Zerbe RC Jr, McCurdy H. 2000. *The End of Market Failure'*. *Analytical Foundation*. Vol. 23 No. 2.